

## Pemahaman dan Partisipasi Politik Gen-Z Provinsi Bali Dalam Menyambut Pemilu 2024

Ahmad Rifki Nurfebriansyah<sup>1</sup>, Tedi Erviantono<sup>2</sup>

1. Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

2. Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Email: rifkiarn@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini membahas pemahaman terkait politik elektorasi calon *first voters* dalam Pemilu 2024 di Provinsi Bali. Sebagian besar pemilih pemula pada pemilu 2024 tergolong ke dalam Gen-Z. Gen-Z adalah orang yang memiliki karakteristik kelahiran tahun 1997-2012, sangat melekat dengan internet, peduli terhadap isu-isu global mengenai sosial dan lingkungan, serta pola komunikasinya melalui visual. Dalam berbagai sumber menyebutkan bahwa Gen-Z memiliki potensi sekaligus juga ancaman terhadap penyelenggaraan pemilu, yaitu dipandang sebagai kelompok apolitis, sehingga untuk meningkatkan partisipasi mereka akan menjadi tantangan yang besar. Artikel ini berangkat dari data penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan siswa SMA/SMK di Bali dengan metode koleksi data berupa *Focus Group Discussion*. Artikel ini menggunakan teori dan konsep terkait pendidikan politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan teori generasi. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa Gen-Z di Bali memahami sistem pemilu karena pernah mengalami peristiwa politis di sekolahnya, seperti pemilihan Ketua OSIS dimana mereka dapat mengetahui mekanisme dasar dari pemilu. Pendidikan politik yang didapat melalui berbagai macam kanal, yaitu lingkungan sekolah, pertemanan, keluarga, media sosial, bahkan KPU juga memberikan sosialisasi kepada mereka.

**Kata Kunci:** Pendidikan Politik, Kepemiluan, Provinsi Bali

### ABSTRACT

*This article discusses the understanding of the electoral politics of prospective first voters in the 2024 elections in Bali Province. Most of the first-time voters in the 2024 election belong to Gen-Z. Gen-Z is a person who has characteristics born in 1997-2012, is very attached to the internet, cares about global issues regarding social and environmental issues, and communication patterns through visuals. In various sources, it is stated that Gen-Z has the potential as well as a threat to the organization of elections, which is seen as an apolitical group, so increasing their participation will be a big challenge. This article departs from research data using descriptive qualitative methods with high school / vocational high school student informants in Bali with data collection methods in the form of Focus Group Discussions. This article uses theories and concepts related to political education, political socialization, political communication, and generational theory. The conclusion of this article is that Gen-Z in Bali understands the electoral system because they have experienced political events in their school, such as the election of the Student Council President where they can know the basic mechanism of elections. Political education is obtained through various channels, namely the school environment, friendship, family, social media, even the KPU also provides socialization to them.*

**Keywords:** Political Education, Election, Bali Province

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi dari setiap warga negara yang bersifat prinsipil dan mempunyai dinamika tersendiri. Pemilu memiliki asas yang disebut dengan *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dan asas tersebut menjadi indikator yang menentukan bagi berjalannya proses demokrasi. Proses demokrasi juga ditunjukkan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang digunakan untuk memilih wakil rakyat. Pemilu tidak hanya dituntut untuk dilakukan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, melainkan penyelenggaraannya perlu memenuhi prinsip jujur, adil, tertib, akuntabel, berkepastian hukum, dsb (KPU RI, 2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menunjukkan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 ini menjadi salah satu perhelatan kontestasi politik yang akan dilaksanakan.

Sebagian besar masyarakat dan penyelenggara seringkali memfokuskan konsentrasi pada kandidat calon presiden dan calon wakil presiden saja, padahal terdapat faktor lain yang mempengaruhi dan menentukan keberhasilan Pemilu yaitu faktor pemilih. Dalam kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota gelombang IV Tahun 2019 di Jakarta, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menyebutkan bahwa terdapat empat penentu kesuksesan Pemilu yang salah satunya adalah pemilih atau masyarakat (Ardianto, 2019). Maka, aspek pemilih menjadi salah satu aspek yang penting dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pemilu. Menyadari bahwa aspek pemilih yang menjadi salah satu aspek yang sama penting dengan kemunculan kandidat para calon, namun pemahaman mengenai pentingnya aspek pemilih di masyarakat belum sepenuhnya merata. Data KPU menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga 2019 persentase golongan putih (*golput*) masih berada di atas 15% (BBC, 2019). Tindakan *golput* seperti ini dapat mempengaruhi kualitas demokrasi secara holistik sekaligus kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya karena setiap suara mempunyai kontribusi dalam menghadirkan calon-calon terbaik pilihan bangsa yang akan menyampaikan aspirasi untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Upaya untuk mengurangi tingkat *golput* dalam Pemilu merupakan salah satu tantangan yang besar untuk semua pihak khususnya penyelenggara Pemilu.

Pemilih dibagi menjadi beberapa golongan tertentu dalam masyarakat yaitu pemilih pemula dan pemilih yang telah memiliki pengalaman dalam menggunakan hak suaranya. Kedua golongan memiliki tantangan masing-masing dalam hal partisipasi Pemilu dan tantangan yang paling besar berasal dari pemilih pemula. Tantangan tersebut hadir karena pemilih pemula tidak punya referensi yang cukup untuk mengetahui tentang siapa yang akan dipilih. Berdasarkan tantangan tersebut, baik pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan setiap partai politik memiliki cara yang berbeda dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam setiap Pemilu. Sebagian besar pemilih pemula dalam Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan nanti tergolong dalam Gen-Z yaitu generasi yang memiliki karakteristik yaitu lahir pada tahun 1997-2012, sangat melekat dengan internet, peduli terhadap isu-isu mengenai sosial dan lingkungan, dan memiliki pola komunikasi secara visual (Alvara, 2022). Beberapa sumber menunjukkan bahwa Gen-Z merupakan peluang sekaligus ancaman yang sama besar yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Salah satu peluang atau ancaman disebutkan dalam litbang Media Indonesia yang menyatakan bahwa Gen-Z memiliki potensi dalam mendominasi Pemilu 2024. tetapi generasi Z juga dipandang sebagai kelompok yang apolitis, maka akan menjadi tantangan yang besar untuk meningkatkan partisipasi mereka (MedCom, 2021).

Persoalan tersebut membuat perlunya penelitian yang lebih lanjut mengenai pendidikan politik pada Gen-Z yang dapat digunakan untuk meminimalisir potensi terjadinya golput pada 2024 nanti. Penelitian ini berjudul “Pemahaman Partisipasi Politik G-Z Provinsi Bali dalam Menyambut Pemilu 2024”. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengawalan serta memberikan pemahaman mengenai Gen-Z supaya tidak menjadi apatis atau golput dalam Pemilu 2024 nanti.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Salah satu definisi dari pendidikan adalah suatu hal yang digunakan secara sengaja dengan tujuan tertentu yaitu mewujudkan perubahan tertentu pada diri peserta didik. Pengajaran atau pendidikan dapat menjadi peran pembantu dalam merealisasikan tujuan sistem politik, melalui pengokohan fungsi dari sistem politik ke dalam jiwa dan akal dari masyarakat (Ruslan & Sayyid, 2000). Politik memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan karena setiap pendidikan yang berjalan tentunya memerlukan arahan politik tertentu. Hubungan antara politik dan

pendidikan telah berubah yang awalnya pola tradisional menjadi pola yang modern. Pendidikan politik sendiri merupakan upaya oleh lembaga-lembaga pendidikan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan membentuk kepribadian politik yang sesuai dengan kultur politik setiap individu dalam institusi politik tersebut (Ruslan & Sayyid, 2000). Harapan dari pendidikan politik adalah kesadaran warga dan sikap pembentukan dan penumbuhan kemampuan partisipasi politik yang aktif yang dapat membawa perubahan secara lebih baik.

Proses sosialisasi politik pengenalan dengan sistem politik sehingga individu melihat atau memberikan reaksi atas gejala-gejala politik yang terjadi. Sosialisasi politik juga merupakan proses ketika individu mendapatkan kepercayaan, pengetahuan, dan menunjukkan sikap politik. Sosialisasi politik memiliki tiga mekanisme tertentu yaitu 1) imitasi, yaitu menirukan tingkah laku individu lain yang dilakukan sejak masa kecil, 2) instruksi yaitu peristiwa penjelasan diri, dan 3) motivasi yaitu adalah bentuk perilaku yang cocok dan tepat untuk dipelajari dengan proses *trial and error*. Program dari sosialisasi politik perlu memasukkan kebutuhan dasar pemilih pemula, dan program ini bisa membentuk pola pikir masyarakat dengan rasional sehingga masyarakat bisa menentukan pemimpin atas dasar kemampuan, kapabilitas, visi misi, atau rekam jejak para calon. Maka, setiap orang harus memahami pengelompokan sosial baik formal, misalnya keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi, dan lain-lain. Selain itu, pengelompokan secara informal misalnya keluarga, pertemanan, atau kelompok-kelompok kecil lainnya adalah suatu yang sangat penting bagi siapapun yang mencoba memahami perilaku politik, karena seluruh kelompok tersebut memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap dan orientasi seseorang.

Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik adalah proses dari penyampaian pesan yang terjadi ketika enam fungsi dijalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan peraturan, pengaplikasian peraturan, dan adjudikasi peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi setiap komunikasi politik terjadi secara interen dari setiap fungsi sistem politik. Komunikasi politik juga merupakan proses ketika informasi politik yang relevan yang ditentukan dengan bagian sistem politik dengan bagian yang lainnya, dan

di antara sistem sosial dan sistem politik (Rush & Althoff, 2010). Komunikasi politik dalam realitasnya juga diasumsikan menjadi sebuah sistem yang konstan, teratur, dan dapat diramalkan.

Partisipasi politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan setiap orang atau sekelompok orang dalam hal menentukan dan mengambil kebijakan pemerintah dalam hal pemilihan pemimpin atau penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah, yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung, dengan cara konvensional atau non konvensional, atau bahkan menggunakan cara kekerasan. Partisipasi politik dapat memunculkan sistem komunikasi yang energik dan membantu mengembangkan nilai-nilai atau norma-norma demokrasi (McLeod et al., 1999). Partisipasi politik itu sendiri dapat terbagi menjadi beberapa kategori (Milbrath & Goel, 1977). Kategori tersebut yaitu partisipasi politik apatis yaitu orang yang tidak memberikan partisipasi dan menarik diri dari proses politik, partisipasi politik *spectator* yang berarti orang-orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam Pemilu, partisipasi politik *gladiator* yang menunjukkan mereka yang aktif berpartisipasi dalam proses politik, serta partisipasi politik pengkritik yaitu orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Perilaku media (*media behavior*) atau kebiasaan menggunakan media (*habits of media*) adalah konsep dasar yang dibentuk dari elemen-elemen yang relatif tetap yaitu struktur sosial dan struktur media (McQuail, 1997). Struktur sosial merujuk pada “fakta sosial” misalnya pendidikan, pendapatan, lokasi rumah, gender, dll yang dapat berpengaruh tentang pandangan umum dan perilaku.

Salah satu penelitian yang relevan datang dari penelitian yang berjudul “Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor” menunjukkan penurunan kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat (Wanma, 2015). Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada beberapa hal, yaitu peran agen terhadap pelaksanaan pendidikan politik untuk generasi muda serta dampaknya. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan observasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah 83% responden yang merupakan generasi muda menunjukkan bahwa pendidikan politik di keluarga berpengaruh terhadap partisipasi politiknya. Selain itu, sekitar 72% responden generasi muda menyatakan bahwa pendidikan politik di lingkungan

kerja mempengaruhi partisipasi politiknya. Sekitar 65% responden generasi muda menunjukkan bahwa pendidikan politik di lingkungan pergaulan mempengaruhi tindakan partisipasi politiknya (Wanma, 2015).

Penelitian lainnya yang berjudul “Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula” menunjukkan bahwa kaum muda adalah kaum yang sulit didekati oleh partai politik atau peserta Pemilu (Kartaningtyas, 2019). Terdapat dua permasalahan yang disusun dalam penelitian ini mengenai bagaimana kontribusi pemilih pemula dalam Pemilu dan mengapa sosialisasi Pemilu bagi pemilih pemula sangatlah penting. Penelitian ini lebih mengulas pada pemilih pemula yang masih duduk di bangku SMA atau SMK yang masih awam terhadap politik, sehingga pilihan mereka tidak didasari oleh pertimbangan yang matang atau beberapa pemilih pemula yang bersikap apatis terhadap politik sehingga pilihannya adalah golput. Pemilih pemula selalu menjadi sasaran strategis bagi peserta pemilu karena tiga hal yaitu jumlah mereka yang relatif besar, perlu diberi arahan yang baik sehingga dapat memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi, dan mereka adalah calon pemimpin masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi dan dideskripsikan sesuai dengan poin-poin yang akan dibahas. Penelitian dengan jenis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa menghubungkan atau membandingkan dengan variabel yang lain, maka penelitian ini hanya mendeskripsikan data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2016). Variabel dalam penelitian ini adalah akses informasi, media habit, sosialisasi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, pemahaman demokrasi, dan pengetahuan mengenai Pemilu. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*). FGD dilakukan secara dua kali menggunakan media daring *Webex* dan *Zoom Meeting*. Informan adalah siswa SMA/ sederajat di wilayah Bali.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akses Informasi Gen-Z Terhadap Partisipasi Politik**

Partisipasi politik memerlukan kanal informasi yang tepat agar setiap generasi Z dapat melihat dan mengakses informasi politik yang lebih lanjut mereka juga dapat menunjukkan partisipasi politiknya. Jangkauan dari sosial media adalah penting untuk menentukan bagaimana partisipasi politiknya (Kim & Hoewe, 2023). Akses informasi generasi Z dibagi menjadi dua jenis yaitu akses informasi melalui daring dan akses informasi melalui luring. Informan memiliki ponsel yang memiliki akses internet. Informan juga menggunakan kuota sendiri daripada WiFi sekolah, karena menurut mereka internet di sekolah lambat. Mereka terkadang saling berbagi hotspot untuk membuat masing-masing tetap terhubung ke internet. Beberapa informan menunjukkan bahwa mereka dapat mengakses informasi melalui Google atau membuka Instagram. Mereka tidak pernah menonton televisi, Mereka tidak menyukai media televisi dan koran karena dianggap terlalu monoton dan dianggap penuh dengan iklan sehingga tampak membosankan. Meskipun begitu, mereka justru lebih mempercayai televisi karena informasi yang disajikan lebih lengkap dan aktual.

Akses informasi yang lainnya adalah melalui media luring. Biasanya, informasi seperti ini dapat disebar dari mulut ke mulut. Mereka juga mendapatkan informasi mengenai politik dari beberapa orang-orang yang berkumpul misalnya bapak-bapak dan obrolan di lingkungan pertemanan. Penyampaian informasi secara mulut ke mulut seperti ini dapat membuat kepercayaan terhadap informasi hadir karena yang menyampaikan informasi berasal dari orang terdekat. Lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan dapat menjadi sumber informasi yang baik mengenai partisipasi politik.

### **Media Habits Gen-Z dalam Mengakses Informasi Politik**

Menggunakan media sosial tentunya membentuk kebiasaan-kebiasaan tertentu yang berpola. Kebiasaan tersebut menyangkut lama waktu yang dihabiskan, Salah satu informan dapat menghabiskan sekitar 7 jam sehari untuk ponselnya. Beberapa informan yang lain dapat menghabiskan hingga waktu 8 hingga 10 jam, bahkan salah satu informan dapat menghabiskan waktu berselancar di dunia maya hingga 12 jam. Mereka menghabiskan waktu tersebut untuk

melakukan selancar di dunia maya, atau refreshing dengan menonton video. Beberapa media sosial yang digunakan adalah *Instagram, Whatsapp, Twitter*, dan Facebook. Beberapa dari mereka bahkan tidak menggunakan TikTok, meskipun sebagian lain menggunakannya. Mereka memilih *Twitter* karena update informasi terbaru dari *Twitter* menyebar lebih cepat. Hanya sedikit dari mereka yang menggunakan media sosial Line Today. Selain itu, mereka juga membuka permainan game online misalnya *mobile legends*. Ketika mendapatkan informasi dari media sosial, beberapa informan juga menunjukkan komentar mereka terhadap informasi tersebut. Penggunaan hal-hal tersebut digunakan ketika mereka menghadapi waktu luang saja.

Meskipun begitu, mereka cukup selektif dalam memilih informasi yang benar-benar mereka percayai. Salah satu informan menunjukkan bahwa televisi adalah media yang paling dipercaya karena siaran langsung dilakukan pada saat peristiwa terjadi. Fungsi media sosial menurutnya adalah untuk pelengkap atau memvalidasi informasi yang terdapat pada televisi.

Terdapat korelasi yang positif antara kapasitas informasional berita *online* dengan partisipasi politik, karena media tersebut memecah hambatan dalam pencarian informasi dan memberikan akses langsung terhadap informasi ke pemerintah (Mossberger et al., 2007). Jika berita *online* kurang berkapasitas misalnya sering menyebarkan berita bohong atau hoax. Mereka juga memiliki pandangan tersendiri sebagai hoax. Menurut mereka, informasi dalam hoax dapat menjadi sebuah kebenaran atau memang sebagai hoax, maka partisipasi politik bisa rendah. Informan berpendapat jika terdapat hoax yang terjadi di Pemilu, maka KPU harus segera mengklarifikasi baik melalui *hotline* atau pernyataan resmi. Klarifikasi tersebut perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak merasa KPU membiarkan informasi simpang siur tetap berlaku.

### **Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik menyangkut pemberian pemahaman politik terhadap anak muda. Proses sosialisasi politik biasanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu. Setiap instansi yang melakukan sosialisasi politik haruslah menggunakan jenis konten dan media yang tepat untuk menyampaikan pesan. Salah satu informan menunjukkan bahwa informasi yang menarik yang disosialisasikan

oleh KPU adalah video dan tulisan. Lebih lanjut, alasan memilih bentuk video adalah karena dapat melihat secara visual dan lebih jelas, dengan hal yang diperagakan dalam video menjadi lebih dipahami. Bahkan, mereka rela kuota mereka terpotong banyak demi menonton video. Meskipun begitu, tulisan menjadi media yang lebih susah dipahami karena perlu memahami bagaimana tafsir dari tulisan tersebut. Salah satu informan yang lainnya menunjukkan bahwa informasi grafis juga mudah dipahami, menarik, dan membuka *mindset*.

Periode antara masa kanak-kanak dan dewasa adalah masa yang potensial bagi setiap orang untuk pembelajaran politik dan pengembangan sikap dan perilaku politik (Abdelzadeh & Lundberg, 2017). Sebagian dari informan menunjukkan pihak sekolah aktif menyebarkan informasi mengenai Pemilu melalui kesiswaan dan ketua kelas masing-masing. Informasi tersebut berupa link postingan *Instagram* KPU.

Salah satu tindakan konkrit mengenai sosialisasi politik adalah dengan memberikan penyuluhan mengenai politik. Sayangnya, tidak semua siswa di Bali mendapatkan penyuluhan tersebut. Salah satu informan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti penyuluhan mengenai Pemilu. Beberapa yang lain pernah mengikuti seminar tentang Pemilu. Selain itu, penyuluhan tersebut juga mengisyaratkan bahwa proses sosialisasi hanya terjadi secara *top-down*, yang mengibaratkan siswa hanya merupakan wadah kosong. Model yang terjadi seperti ini dapat menimbulkan sikap apatisisme bagi siswa (Habashi, 2017).

### **Pembicaraan Gen-Z dalam Pemahaman Demokrasi**

Komunikasi politik berkaitan dengan cara-cara tokoh tertentu dalam menunjukkan tindakan mereka dan cara komunikasi mereka dalam forum politik. Tidak banyak informasi yang didapat dari informan mengenai penilaian bagaimana cara tokoh politik di Indonesia dalam berkomunikasi, melainkan mereka hanya mengikuti beberapa kegiatan misalnya debat capres dan cawapres. Beberapa isu politik yang mereka ketahui adalah isu Jokowi menjadi presiden selama 3 periode berturut-turut, selain itu mereka juga mengetahui mengenai Ganjar Pranowo yang maju menjadi calon presiden. Selain itu, mereka juga mengikuti berita tentang Anies Baswedan yang mencari pasangan calon presiden.

Meskipun begitu, mereka memiliki pemahaman demokrasi yang baik. Salah satu informan menyatakan bahwa ia tetap memberikan hak suara karena mereka karena menyadari bahwa memberikan hak suara merupakan perannya dan menginginkan perubahan yang lebih baik. Salah satu informan mengatakan bahwa berpartisipasi dalam Pemilu merupakan hal masing-masing, jadi memberikan suara adalah bersifat sukarela. Meskipun terdapat beberapa orang yang menghasut pemilih untuk memilih calon tertentu, tetapi kemauan untuk memilih tetaplah menjadi hak masing-masing.

Mereka juga berpendapat mengenai tindakan memilih itu sendiri. Sebagian informan berpendapat bahwa memilih adalah hak, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa hal itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Sebagian memilih hak karena setiap warga negara tidak bisa dipaksa untuk memilih bahkan tidak memilih, karena setiap orang memiliki hak asasi manusia. Informasi yang menjawab kewajiban menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban memilih karena hal tersebut memang menjadi tanggung jawab mereka. Tanggung jawab hal ini adalah mengenai nasib bangsa selama satu periode ke depan tergantung dengan apa yang mereka pilih.

Informan berpendapat bahwa setiap warga negara membutuhkan sosok pemimpin yang peduli dengan warga negara. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan dorongan pemimpin kepada warganya untuk berkembang menjadi lebih baik secara bersama-sama. Informan tidak mempermasalahkan mengenai latar belakang suku bangsa atau agama calon pemimpin, melainkan yang digarisbawahi adalah kapasitas dan pengetahuannya.

### **Pengetahuan Mengenai Pemilu dari Gen-Z**

Informan telah mengetahui cara dalam mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Meskipun begitu, mereka tetap penasaran mengenai proses penghitungan suara. Informan berpendapat bahwa anak muda yang berkontribusi dalam proses pemungutan suara (misalnya menjadi ketua TPS) dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Beberapa informan lain menunjukkan bahwa mereka juga ingin untuk menjadi ketua TPS. Setiap anak muda sangat terbuka terhadap pengaruh eksternal yaitu pengalaman personal, sosial, kultural, historis, bahkan politik (Sears et al., 2003). Khusus pengalaman politik, informan telah

mendapatkan contoh model pemilu melalui pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada sekolah mereka.

Beberapa orang tidak dapat menggunakan haknya dalam pemilu karena kurang memahami dampak yang akan dihasilkan dalam pemilu tersebut. Menurut beberapa informan yang lain, sebagian orang yang tidak menggunakan haknya dalam pemilu karena mereka memang tidak peduli dengan kondisi Pemilu tersebut. Salah satu informan yang lain bahkan tidak mengetahui sama sekali mengenai apa itu KPU. Sebagian yang lain tahu mengenai KPU beserta kepanjangan singkatannya. Sebagian informan bahkan mengikuti akun Instagram KPU di daerahnya masing-masing.

### **Partisipasi Politik Gen-Z**

Beberapa responden mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti artis yang terkenal saja dibandingkan tokoh-tokoh politik atau olahraga. Mereka juga mengikuti akun *Instagram* informasi mengenai kondisi lokal atau *update* mengenai peristiwa lokal Misalnya @infobali atau @infokarangasem. Meskipun tindakan ini adalah bentuk dari keterlibatan daring dengan skala rendah, namun jika tindakan ini terakumulasi maka akan mengarah pada tindakan luring seperti pemungutan suara (Wang, 2022). Dengan kata lain, mereka dapat memilih pemimpin tertentu dengan akun lokal atau tokoh non-politik jika akun-akun tersebut cenderung mendukung salah satu pasangan calon.

Mereka juga terbilang tidak terlalu suka dengan politik. Bagi mereka, politik terlihat membosankan karena berisi orang-orang yang berselisih Bahkan, sebagian dari mereka tidak mengetahui Anies Baswedan, salah satu calon presiden.

Salah satu informan baru memutuskan pilihan politiknya apabila calon tersebut terlihat meyakinkan, dan tanpa dipengaruhi oleh pilihan keluarga atau teman-teman mereka. Dalam beberapa kasus tertentu, lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan memang benar-benar tidak memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan mengenai pilihan anak muda. Bahkan, salah satu informan mengatakan bahwa Pilkada Jembrana beberapa tahun lalu kurang penting karena tidak terlalu berpengaruh ke kehidupan informan. Meskipun begitu, beberapa informan yang lain menganggap Pilkada di tempat lain (Tabanan, Denpasar,

Karangasem) berpengaruh karena setiap kepala daerah dapat memberikan kebijakan baru yang memberikan perubahan menjadi lebih baik.

Jika dilihat melalui kategorisasinya, maka partisipasi politik dari responden rata-rata dapat digolongkan ke partisipasi politik *spectator*, yaitu orang-orang yang setidaknya tetap memberikan pilihan ke pasangan calon (Milbrath & Goel, 1977). Kategori ini dikarenakan bahwa siswa tersebut setidaknya menggunakan hak suaranya dalam Pilkada di daerah mereka.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai Pemilu 2024 di kalangan anak muda di Provinsi Bali pada tingkat rata-rata. Mereka memahami sistem pemilu karena pernah mengalami peristiwa politis di sekolahnya. Pendidikan politik yang didapat melalui berbagai macam kanal, yaitu lingkungan sekolah, pertemanan, keluarga, media sosial, bahkan KPU juga memberikan sosialisasi kepada mereka. Permasalahannya adalah sebagian yang lain merasa perkembangan politik tidak berpengaruh bagi mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kepedulian Gen-Z dan meminimalisir apatisme mereka di Provinsi Bali adalah dengan melakukan sosialisasi secara *bottom-up*, dengan melibatkan mereka dengan pengalaman-pengalaman politik tertentu. Pengalaman politik seperti pemilihan ketua OSIS dapat membuat mereka dapat mengetahui mekanisme dasar dari Pemilu, maka KPU perlu membuat simulasi pemilihan umum bagi pelajar untuk mendorong mereka aktif bertindak sebagai aktif politik sekaligus menjawab rasa penasaran mereka mengenai detail sistem Pemilu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdelzadeh, A., & Lundberg, E. (2017). Solid or Flexible? Social Trust from Early Adolescence to Young Adulthood. *Scandinavian Political Studies*, 40(2), 207–227.
- Alvara. (2022). *Gen Z: Millennial 2.0? Perbedaan Karakter dan Perilakunya*. Alvara Strategic. <http://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/2022/06/GEN-Z%E2%BC%9A-MILLENNIAL-2.0%E2%BC%9F-Perbedaan-Karakter-dan-Perilakunya.pdf>

- Ardianto, R. (2019, September 26). *Abhan Jabarkan Empat Elemen Penentu Kesuksesan Pemilu*. Bawaslu RI. <https://bawaslu.go.id/id/berita/abhan-jabarkan-empat-elemen-penentu-kesuksesan-pemilu>
- BBC. (2019, May 3). *Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004*. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>
- Habashi, J. (2017). Political socialization of youth: A Palestinian case study. In *Political Socialization of Youth: A Palestinian Case Study*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-47523-7>
- Kartaningtyas, S. (2019). Urgensi Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(1).
- Kim, B., & Hoewe, J. (2023). Developing contemporary factors of political participation. *Social Science Journal*, 60(4), 862–876. <https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1782641>
- KPU RI. (2022, June 9). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*. KPU RI.
- McLeod, J. M., Scheufele, D. A., & Moy, P. (1999). *Community, communication, and participation: The role of mass media and interpersonal discussion in local political participation*. <https://doi.org/10.1080/105846099198659>
- McQuail, D. (1997). *Audience analysis*. SAGE.
- MedCom. (2021, November 13). *Merebut Suara Generasi Z di Pemilu 2024*. MedCom Id. <https://www.medcom.id/foto/grafis/ybD4xVRb-merebut-suara-generasi-z-di-pemilu-2024>
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political participation: How and why do people get involved in politics?*
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2007). *Digital citizenship: The Internet, society, and participation*. MIT Press.

- Rush, & Althoff. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana Prenada Media Group.
- Ruslan, U. A., & Sayyid, S. A. (2000). *Tarbiyah Siyasiyah: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Era Intermedia.
- Sears, D. O., Huddy, L., & Jervis, S. (2003). *Oxford Handbook of Political Psychology*. Oxford University Press.
- Wang, L. (2022). Race, social media news use, and political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 19(1), 83–97.  
<https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1923497>
- Wanma, A. V. (2015). Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6).